



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : EKO SASMITO, SH, MH**

**Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 11 Januari 2017

Ketua

**EKO SASMITO, SH, MH**

**PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77,5%
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada	75%
		3	Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	75%
		4	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 %
		5	Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	1	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60%
		2	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%
		3	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	3%
		4	Opini BPK Atas LHP	WTP
		5	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu dan pemilukada.	86%
		6	Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Anggota Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur.	100%
3	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU	1	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Regulasi	90%
		2	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%

Program		Anggaran (Rp.)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	7.605.928.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	10.000.000
3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	407.935.000
<b>Jumlah</b>		<b>8.023.863.000</b>

Surabaya, 11 Januari 2017

KETUA

EKO SASMITO, SH, MH

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target %
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77,5%
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada	75%
		3	Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	75%
		4	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 %
		5	Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	1	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60%
		2	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%
		3	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	3%
		4	Opini BPK Atas LHP	WTP
		5	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu dan pemilukada.	86%
		6	Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Anggota Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur.	100%
3	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU	1	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Regulasi	90%
		2	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%

Surabaya, 11 Januari 2017

KETUA

EKO SASMITO, SH, MH

**RENCANA AKSI KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Kegiatan	RENCANA PELAKSANAAN				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada</li> <li>2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada</li> <li>3 Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya</li> <li>4 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih</li> <li>5 Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlihatkan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas</li> </ol>	77,5%	Tahapan pemilihan	✓				Divisi Teknis dan Bagian Teknis dan Hupmas
			75%	Tahapan pemilihan	✓				Divisi Teknis dan Bagian Teknis dan Hupmas
			0,2 %	Tahapan pemilihan	✓				Divisi Teknis dan Bagian Teknis dan Hupmas
			100%	Tahapan pemilihan					Divisi Teknis dan Bagian Teknis dan Hupmas
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase Terpenuhnya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU</li> <li>2 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian</li> <li>3 Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada</li> <li>4 Opini BPK Atas LHP</li> </ol>	60%	Peningkatan SDM	✓	✓	✓	✓	Divisi SDM dan Parmas, didukung Bagian Program Data, Organisasi dan SDM
			100%	Peningkatan SDM	✓	✓	✓	✓	Divisi SDM dan Parmas, didukung Bagian Program Data, Organisasi dan SDM
			3%	Peningkatan SDM	✓	✓	✓	✓	Divisi SDM dan Parmas, didukung Bagian Program Data, Organisasi dan SDM
			WTP	Laporan LAKIP dan review laporan keuangan	✓	✓	✓	✓	Semua Divisi dan Bagian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target %	Kegiatan	RENCANA PELAKSANAAN				Pelaksana
						T1	T2	T3	T4	
		5	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu dan pemilukada.	86%	Tahapan pemilihan			✓	✓	Semua Divisi dan Bagian
		6	Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Anggota Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur.	100%	Tahapan pemilihan			✓	✓	
3	Perbaikan Kualitas Kepemilihan yang Diatur Oleh KPU	1	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Regulasi	90%	Tahapan pemilihan		✓	✓		Semua Divisi dan Bagian
		2	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%	Tahapan pemilihan	✓	✓	✓	✓	

Surabaya, Januari 2017

  
 KETUA  
 EKO SASMITO, SH, MH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**Nomor : 13 /Kpts/Prov.014/2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HM. E KAWIMA, SH, M.Si

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : EKO SASMITO, SH, MH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

**Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,<sup>11</sup> Januari 2017

**PIHAK KEDUA**  
**Ketua,**

**EKO SASMITO, SH, MH**

**PIHAK PERTAMA**  
**Sekretaris,**

**HM. E. KAWIMA, SH, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19660623 199003 1 005**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Bobot
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	1 Dokumen 100
2	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan 100
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Laporan 39 Satker
4	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 Bulan Layanan 100
5	Terlaksananya Pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistic pemilu	Persentase pola pengelolaan logistic Pemilu di tingkat satker	1 Dokumen 100
6	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistic Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	12 Layanan Pengadaan 90
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan Peng anggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 dokumen 100
8	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	16 Laporan 100
9	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Timur	1 dokumen 100
10	Tersusunnya rencana kerja tahunan pemilihan	Persentase penyusunan rencana kerja pemilihan	1 dokumen 100
11	Tersusunnya laporan capaian kinerja pemilihan	Presentase penyusunan capaian kinerja pemilihan	6 dokumen 100
12	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	6 Laporan 90
13	Tersedianya Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	1 dokumen 100
14	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak Lanjut	2 unit 100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Bobot
1	2	3	4
15	Meningkatnya Akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	1 dokumen 100
16	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	12 Bulan Layanan 100
17	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	1 Laporan WTP
18	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	2 Laporan 100
19	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik Kantor KPU	1 unit 100
20	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	1 kasus 100
21	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	1 Laporan 100
22	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	1 kegiatan 100
23	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 Dokumen 100
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	3 Laporan 100
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	1 Satuan Kerja 38
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	1 Dokumen 100
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 Dokumen 38
		Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	1 Satuan Kerja 38

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Bobot
1	2	3	4
		Jumlah kualitas dukungan teknis dalam Pemilihan Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 laporan 100

Surabaya, 11 Januari 2017

SEKRETARIS,



MUHAMMAD EBERTA KAWIMA

**RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Bulan												Pelaksana	
			Bobot			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	Meningkatnya Pembinaan pembendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat pembendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam pengelolaan keuangan	1 Dokumen	100	Layanan Pembinaan Pembendaharaan KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan
2	Terselenggaranya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	100	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU, Provinsi dan Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	39 Sakter	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan
4	Terselenggaranya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 Dialek Layanan	100	Layanan Perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan
5	Terselenggaranya Pembinaan koordinasi tingkat sakter dalam mengelola logistic pemilu	Persentase pola pengelolaan logistic Pemilu di tingkat sakter	1 Dokumen	100	Data Kelembahan dan anggaran logistic pemilu/pemilihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan
6	Terselenggaranya pelaksanaan SOP pengelola an logistic Pemilu	Persentase pelaksanaan SOP pengelolaan logistic Pemilu	12 Layanan Pengadaan	90	Layanan pengadaan logistic Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan Peng anggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kecurangan antara Kemstra dan Renju K/L dan RKA KL	1 dokumen	100	Dokumen Perencanaan Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Program dan Data
8	Terselenggaranya sistem Administrasi penyelesaian/pengelolaan pemilu yang terhib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat/tepat dan tepat waktu	16 Laporan	100	Laporan pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik
9	Tersedianya data, informasi dari sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase penataakhiran data pemilu di tingkat kabupaten di seluruh Jawa Timur	1 dokumen	100	Dokumen Penataakhiran Data Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Program dan Data
10	Tersusunnya rencana kerja tahunan pemilihan	Persentase penyusunan rencana kerja tahunan	1 dokumen	100	Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Program dan Data
11	Tersusunnya laporan capaian kinerja pemilihan	Persentase penyusunan capaian kinerja pemilihan	6 dokumen	100	Analisis capaian kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Program dan Data
12	Tingkat kecapaian terhib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	61 laporan	90	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Organisasi dan SDM
13	Tersedianya Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	1 dokumen	100	Dokumen kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Organisasi dan SDM
14	Meningkatnya kapasitas personal pengelola BMN	Persentase ketepatan dan keteb administrasi pelaksanaan evaluasi tindak Lanjut	2 unit	100	Laporan Persediaan (Stock Opname)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Umum dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Bulan												Pelaksana	
					Bobot	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11		B12
15	Meningkatnya Akuntabilitas, penataan, pendulum dan penilaian asisp	3 Persentase jumlah saktor KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola asisp sesuai aturan kearsipan	4 1 dokumen 100	5 Pengelolaan dan Pencapaian Kearsipan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18 Sub Bagian Umum dan Logistik

16	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	12 Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personel anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	12 Bulan Layanan 100	13 Layanan Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik, serta Keuangan	
17	Terwujudnya laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CCC	1 Laporan WTP	14 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Program dan Data	
18	Terwujudnya laporan hasil review laporan keuangan	2 Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	2 Laporan 100	15 Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan	
19	Meningkatnya perubahan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebel/elektronik Kantor KPU	1 unit 100	16 Perubahan dan Fasilitas Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik	
20	Meningkatnya kualitas pembinaan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	1 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	1 kasus 100	17 Advokasi dan Sengketa Hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Hukum	
21	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1 Terlaksunanya dukungan kearsafsahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	1 Laporan 100	18 Layanan Administrasi kependidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Hukum	
22	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan penhambakan peraturan perundang-undangan	1 Persentase Provinsi yang mendapatkan persetujuan peraturan KPU	1 kegiatan 100	19 Kenyamanan Peraturan Turundang-undangan Pembantu dan Pembuktasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Hukum	
23	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 Dokumen 100	20 Tenggelaman PAW Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Humas	
			3 Laporan 100	21 Publikasi Informasi Pemilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Humas
			1 Satuan Kerja 38	22 Pembentukan PPTD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Humas
			1 Dokumen 100	23 Dokumen Daerah Pembinaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1 Dokumen 38	24 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pembuktasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Humas	
			1 Satuan Kerja 36	25 Pusat Penyelidikan Pembilih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Humas	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Bulan												Pelaksana						
			Bobot	1 laporan ICQ		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		13	14	15	16	17	
1		Jumlah Kualitas dukungan teknis dalam Pemilihan Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur			1 tahun Pemilihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18	Sub Bagian Teknis dan Hipotesis

Surabaya, Januari 2017

SEKRETARIS,  
  
 MURNI MAID EBERTIA KAWINIA

**PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
			Bobot			
1	Meningkatnya Pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	1 Dokumen	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	31.724.000,00	
			100		-	
2	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	70.971.000,00	
			100		-	
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	33.156.000,00	
			39 Satker		-	
					-	
4	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 Bulan Layanan	Layanan Perkantoran	5.610.031.000,00	
5	Terlaksananya Pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistic pemilu	Persentase pola pengelolaan logistic Pemilu di tingkat satker	100		-	
			1 Dokumen	Data Kebutuhan dan anggaran logistic pemilu/pemilihan	93.014.000,00	
6	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelola an logistic Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistic Pemilu	12 Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan logistic Pemilu	30.958.000,00	
			90		-	
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan Peng anggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 dokumen	Dokumen Perencanaan Anggaran	83.924.000,00	
			100		-	
8	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat/tepat dan tepat waktu	16 Laporan	Laporan pelaksanaan kegiatan	12.622.000,00	
			100		-	
9	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilu di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Timur	1 dokumen	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilu	103.524.000,00	
			100		-	
10	Tersusunnya rencana kerja tahunan pemilihan	Persentase penyusunan rencana kerja pemilihan	1 dokumen	Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan	2.360.000,00	
			100		-	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
			Bobot			
1	2	3	4	5	5	5
11	Tersusunnya laporan capaian kinerja pemilihan	Persentase penyusunan capaian kinerja pemilihan	6 dokumen 100		Analisis capaian kinerja	145.547.000,00 -
12	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	6 Laporan 90		Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	49.675.000,00 -
13	Tersedianya Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	1 dokumen 100		Dokumen kepegawaian	29.909.000,00 -
14	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	2 unit 100		Laporan Persediaan (Stock Opname)	4.700.000,00 -
15	Meningkatnya Akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah sakter KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	1 dokumen 100		Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	31.575.000,00 -
16	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	12 Bulan Layanan 100		Layanan Perkantoran	1.178.028.000,00 -
17	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	1 Laporan WTP		Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	28.000.000,00 -
18	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	2 Laporan 100		Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	66.210.000,00 -
19	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik Kantor KPU	1 unit 100		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10.000.000,00 -
20	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	1 kasus 100		Advokasi dan Sengketa Hukum	19.500.000,00 -
21	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	1 Laporan 100		Layanan Administrasi keperluan	15.115.000,00 -